

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpindahan (*nomadisme*) politik merupakan istilah baru dalam dunia politik berdasarkan paradigma postmodernisme. Postmodernisme dapat diartikan sebagai perspektif yang menolak sebuah pemikiran baru dan solusi dari perbaikan paham modernisme berdasarkan ilmu pengetahuan yang dianggap gagal mengangkat martabat manusia dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia karena memberikan kritikan-kritikan yang menggeser ide-ide modern menjadi ide yang baru.¹

Nomadologi adalah ilmu atau proses tentang perpindahan terus menerus sebuah entitas, wujud, orang, kelompok atau komunitas dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu tetorial ke tetorial lainnya tanpa henti, yang di dalamnya tidak pernah ada ketetapan dari identitas.² Dalam hal ini, secara spesifik Piliang mendefinisikan perpindahan itu ke dalam konteks semiotika atau mencari ilmu.

Menurut Gilles Deleuze dan Felix Guattari yang dikutip Piliang menggambarkan setiap nomad sebagai entitas politik atau pemerintahan yang dicirikan oleh sifatnya yang selalu berpindah, menjadi (*becoming*), berdeformasi,

¹ Johan Setiawan dan Ajat Sudrajat, "Pemikiran Postmodernisme Dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan," *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (2018): 25.

² Yasraf Amir Piliang, *Transpolitika: Dinamika Politik Di Dalam Era Virtualitas*, ed. Alfathri Adlin (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2005).

bertransmutasi, bermetamorfosis: turbulen, tanpa ego, eksekutif deviatif tanpa pusat, anti identitas, anti ketetapan, selalu mengalir dan selalu bergejolak (*flux*).³ Sehingga tanda-tanda yang menggambarkan atau digambarkan tentang realitas dirinya dengan mudah berubah-ubah dan bergerak bebas tak beraturan pada ruang politik. Hal ini dapat membuat pesona seorang nomadik tidak mempunyai ketetapan politik atau tidak mempunyai realitas yang melekat dengan identitas tentang dirinya. Kesan yang muncul adalah semua realitas hanyalah wujud yang kosong, selalu berbeda, dan kacau. Bahkan lebih sering secara singkat, realitas yang akhirnya dianggap sebagai realitas adalah kesan itu sendiri, sekaligus kesan yang menunjukkan suatu hal yang benar-benar bukan menjadi tujuan oleh si pelaku. Seperti halnya hanya serupa topeng dan *counterfeit* (tiruan) belaka.⁴

Perpindahan (*nomadisme*) dalam politik seringkali ditujukan pada para politisi yang senang melakukan pengembaraan atau perpindahan dari satu partai politik ke partai politik lainnya, yang lazim disebut dengan politisi nomaden. Politisi nomaden dalam praktik politik Indonesia kontemporer sering diperlihatkan secara publik oleh para politisi, baik itu oleh politisi senior maupun politisi yang masih awam di dunia politik.

Partai politik merupakan suatu organisasi yang sangat berperan besar dalam menciptakan pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional.⁵ Pemimpin yang

³ *Ibid*, hal. 157

⁴ *Ibid*, hal. 157

⁵ Tri Jata Pramesti Ayu, "Fungsi Partai Politik," *hukumonline.com*, last modified 2015, diakses 18 Oktober, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-partai-politik-lt550a445c6466c/>.

berkualitas harus siap menjadi pemimpin nasional. Sebab, tidak hanya kepentingan partai politik yang menjadi cakupannya saja yang akan dikelola olehnya, akan tetapi ia akan menjadi pemimpin semua orang ketika ia naik menjadi pemimpin nasional. Struktur dan sistem politik memiliki tanggung jawab yang besar untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Dalam melaksanakan tugasnya, partai politik harus mengembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik.⁶

Sistem rekrutmen adalah langkah awal untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik.⁷ Kemudian, setelah itu akan difilter agar dapat dilihat kecocokan antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Orang-orang yang perlu untuk direkrut pastinya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi yang sama serta memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Persaingan pun juga akan dialami antar sesama partai politik, karena para partai politik akan memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya akan menjadi penopang untuk memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politik.

Dengan adanya pragmatisme partai, maka ideologi yang dimiliki partai bukan menjadi hal yang penting lagi untuk saat ini.⁸ Hal tersebut mengakibatkan partai hanya dapat dibedakan oleh namanya saja, karena hilangnya identitas yang dimiliki dari

⁶ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, "Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–820, [https://repository.bakrie.ac.id/1246/1/01.Kaderisasi Parpol dan Pengaruhnya thd Kepemimpinan Nasional %28Jurnal Politik LIPI%29.pdf](https://repository.bakrie.ac.id/1246/1/01.Kaderisasi%20Partai%20Politik%20Sebagai%20Sarana%20Rekrutmen%20Politik%20Pada%20Partai%20Demokrasi%20Indonesia%20Perjuangan%20(Pdi-P)%20Kabupaten%20Semarang.pdf).

⁷ W Afifa, "Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi-P) Kabupaten Semarang," unnes.ac.id, Skripsi, (Universitas Negeri Semarang, 2011).

⁸ Sahrudin, "Partai Miskin Ideology Pemicu Lahirnya Kutu Loncat Partai Politik.," *p4m.unas.ac.id*, last modified 2022, diakses 19 Oktober, 2023, <http://p4m.unas.ac.id/politik-lokal-dan-otonomi-daerah/partai-miskin-ideologi-pemicu-munculnya-politisi-kutu-loncat/>.

masing-masing partai. Sistem rekrutmen atau pengkaderan yang minim menjadikan kesempatan bagi kader atau politisi yang berpindah dari satu partai ke partai politik lain atau yang biasa disebut “kutu loncat” akan menjadi subur. Saat ini politisi bisa masuk ke Partai A dan besok sudah berada di Partai B. Politisi oportunistik yang bergabung dengan partai politik hanya bertujuan untuk mengutamakan pada kepentingan politik pribadinya saja, sehingga jika ada kepentingan yang tidak dapat diperjuangkan dalam partai tersebut maka dengan mudahnya akan melirik partai lainnya yang dapat memberikan kesempatan untuk kepentingan politiknya sendiri.⁹

Fenomena ini didukung oleh partai politik yang memberikan peluang bagi para politisi untuk bergabung ke dalam partainya, karena kehadiran para politisi tersebut kemungkinan besar akan meningkatkan suara terhadap partai melalui uang dan popularitasnya, sekaligus dapat dipercaya dapat memajukan performa partai karena dianggap sudah berpengalaman di partai lainnya.¹⁰ Meski sikap terbuka partai ini menimbulkan dampak yang berbahaya karena mengabaikan prinsip dan standar etika politik, namun para politisi tersebut tetap melakukannya demi untuk kepentingan pribadi. Hal ini menciptakan politisi korup yang tidak peduli dengan nasib masyarakat. Partai yang mempunyai ideologi yang kuat dan jelas dan selalu mempunyai kendali yang ketat dalam menjaga kemurnian ideologi partai dapat mencegah maraknya politisi

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Inra Reskia Putra, “Analisis Perilaku Pindah Partai Pada Anggota Partai Politik Di Kabupaten Gowa Tahun 2014”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

“*jump-and-run*” (melompat dan pergi) sekaligus politisi juga akan susah untuk beraliansi dengan partai tertentu.¹¹

Syamsuddin Haris menunjukkan pergerakan partai politik disebabkan oleh lemahnya ikatan kelembagaan antara calon anggota parlemen dengan partai politik yang didukungnya.¹² Sehingga para wakil DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala dan wakil kepala daerah dapat dengan mudah mengambil langkah mundur atau berganti partai politik di tengah masa jabatannya, tanpa merasa adanya kegagalan dalam kekuasaan di partai politik yang tidak diimbangi dengan perkembangan internal partai politik. Dengan kata lain, pengurusan internal partai politik dan pengelolaan keuangan tidak ditangani secara profesional. Hal ini menimbulkan ketegangan di dalam partai politik dan berujung pada konflik. Ketegangan internal dan konflik di dalam partai menjadi salah satu faktor pendorong perpindahan politisi di partai politik.¹³ Fenomena perpindahan anggota partai dari satu partai ke partai lain kerap dianggap sebagai bentuk penghianatan terhadap amanat yang sudah diberikan.¹⁴ Berikut adalah daftar partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

¹¹ Sahrudin, “Partai Miskin Ideology Pemicu Lahirnya Kutu Loncat Partai Politik.” *Op. cit*

¹² Syamsuddin Haris, “NU dan Politik: Perjalanan Mencari Identitas”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990) hal. 41 (Dalam Skripsi Inra Reskia Putra, ‘Analisis Perilaku Pindah Partai Pada Anggota Partai Politik Di Kabupaten Gowa Tahun 2014’ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

¹³ *Ibid*, hal. 6

¹⁴ *Ibid*, hal. 6

Tabel 1. 1
Daftar Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tingkat Provinsi di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2024

No	Partai Politik
1	Partai Amanat Nasional (PAN)
2	Partai Bulan Bintang (PBB)
3	Partai Buruh
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5	Partai Demokrat
6	Partai Ummat
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Partai Gerindra
9	Partai Golongan Karya (Golkar)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
12	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
13	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
14	Partai NasDem
15	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
16	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
17	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Sumber: *valoranews.com*

Tentunya terdapat beberapa kajian mengenai mengenai perilaku berpindah partai yang dilakukan oleh anggota partai politik yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang meneliti dengan judul bertajuk “Perilaku Politik Dan Kekuasaan Politik (Studi Perpindahan Partai Politik Basuki Tjahaja Purnama Dalam Perpolitikan di Indonesia)” oleh Denayu Swami Vevekananda pada tahun 2017.¹⁵

¹⁵ Denayu Swami Vevekananda, “Perilaku politik dan kekuasaan politik (Studi Perpindahan Partai Politik Basuki Tjahaja Purnama Dalam Perpolitikan di Indonesia)”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Fenomena dalam penelitian ini adalah berpindahnya Basuki dari Partai Golkar ke Partai Gerindra.

Kemudian ada yang membahas dengan judul “Analisis Perilaku Pindah Partai Pada Anggota Partai Politik Di Kabupaten Gowa Tahun 2014” yang diteliti oleh Inra Reskia Putra tahun 2017.¹⁶ Fenomena yang diangkat pada penelitian ini adalah maraknya politisi pindah partai di Kabupaten Gowa jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2014 yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam motif. Partai politik sebagai corong aspirasi masyarakat kurang efektif dalam perekrutan dan pengkaderan terhadap anggotanya. Sehingga anggota partai politik dalam aktifitas politiknya tidak menjiwai ideologi dan nilai perjuangan partai.

Selain itu, pada Amarta Faza dengan judul penelitian “Fenomena Pindah Partai Calon Anggota Legislatif Di Kabupaten Malang”.¹⁷ Terdapat fenomena pindah partai politik yang dilakukan oleh calon anggota legislatif di Kabupaten Malang menjelang masa Pemilihan Umum Legislatif 2019 pada penelitian ini.

Adapun penelitian dari Moh. Ali Mas’udi, Slamet Muchsin, dan Khoiron yang berjudul “Analisis Nomadisme Politik Dalam Pemilukada 2020 (Studi Perpindahan Elit Politik (Sanusi) Dari PKB Ke PDI-Perjuangan Di Kabupaten Malang)”¹⁸ Pada

¹⁶ Putra, “Analisis Perilaku Pindah Partai Pada Anggota Partai Politik Di Kabupaten Gowa Tahun 2014.” *Op.cit*

¹⁷ A Faza, “Fenomena Pindah Partai Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Malang”, Tesis, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) <<https://eprints.umm.ac.id/64275/%0Ahttps://eprints.umm.ac.id/64275/1/NASKAH.pdf>>.

¹⁸ Khoiron Mohammad Ali Mas’udi, Slamet Muchsin, “Analisis Nomadisme Politik Dalam Pemilukada 2020 (Studi Perpindahan Elit Politik (Sanusi) Dari PKB Ke PDI-Perjuangan Di Kabupaten Malang),” *Jurnal Respon Publik* 15, no. 9 (2021): 31–35.

penelitian ini, fenomena yang terjadi adalah pada politisi yang berasal dari Jawa Timur di Kabupaten Malang yaitu H. Rendra Kresna yang pada awalnya dari partai Golkar lalu pindah ke partai Nasdem. Namun tidak berselang lama wakil bupati malang yang maju mendampingi bupati malang H. Rendra Kresna pada periode 2015-2020, Sanusi yang maju dalam pilkada di kabupaten malang tahun 2020, juga melakukan hal yang sama yang sebelumnya dilakukan bupati malang H. Rendra Kresna yang pindah partai. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Sanusi pindah partai yang awalnya dari partai PKB pindah ke PDI-Perjuangan pada menjelang pilkada 2020 di Kabupaten Malang.

Terakhir, penelitian yang berjudul “Fenomena Alih Keanggotaan Partai Politik (Studi Pada Partai Amanat Nasional Kabupaten Lampung Timur)” yang diteliti oleh Lilis Suryani.¹⁹ Fenomena dari penelitian ini adalah terdapat kader atau pengurus Partai Amanat Nasional Kabupaten Lampung Timur yang menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Amanat Nasional dan setelah mengundurkan diri ada dari beberapa kader tersebut yang kemudian menyatakan bergabung dengan partai lain.

Terdapat perbandingan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yang berjudul “Analisis Perpindahan (*Nomadisme*) Politik Pada Calon Legislatif Di Sumatera Barat Tahun 2023’, antara lain pada lokasi penelitian dan fenomena penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian ditujukan ke Sumatera Barat. Penelitian perpindahan (*nomadisme*) politik yang mengambil lokasi di Sumatera Barat ini masih belum banyak ditemukan. Selanjutnya, dilihat dari fenomena penelitian.

¹⁹ Lilis Suryani et al., “Fenomena Alih Keanggotaan Partai Politik (Studi Pada Partai Amanat Nasional Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Fenomena dari penelitian ini diambil dari seluruh caleg di Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 4 orang dari berbagai partai yang berbeda-beda melakukan perpindahan (*nomadisme*) politik. Seluruh caleg tersebut melakukan pindah partai ke partai tujuannya masing-masing. Ideologi partai dan ideologi individu sering menjadi alasan dan motif dari perilaku pindah partai ini. Perbedaan yang sering terjadi antara prinsip individu dengan partai adalah terdapat rasa kekecewaan terhadap partai yang menjadi penunjang karier politiknya untuk mencapai keinginan mereka atau bahkan ketidakpuasan dan kondisi politik internal partai yang memaksa mereka untuk keluar dari partai.

Melalui permasalahan diatas, dapat berdampak pada struktural organisasi partai politik itu sendiri. Dampaknya dapat mengakibatkan lahirnya dualisme kepengurusan partai. Peneliti berasumsi bahwa selain perbedaan persepsi dan ketidakcocokan antara ideologi individu dengan ideologi partai politiknya yang menjadi alasan atau motivasi anggota partai politik melakukan pindah partai adalah adanya tawaran posisi atau jabatan hingga adanya tawaran mahar yang lebih besar. Karena, dengan majunya para caleg tersebut sudah dapat ditentukan bahwa mereka akan menempati posisi-posisi yang akan ia duduki jika menang nanti.

Dengan demikian, pada penelitian kali ini peneliti memfokuskan pada perpindahan (*nomadisme*) politik yang dilakukan oleh caleg di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku caleg dalam memilih partai tujuannya. Melihat fenomena yang terjadi pada caleg di Provinsi Sumatera Barat, maka

peneliti tertarik untuk mengkaji perpindahan (*nomadisme*) politik pada caleg di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena pindah partai yang dilakukan oleh para politisi sudah menjadi hal yang biasa di negeri ini. Berbagai alasan menjadi dasar penyebab dari terjadinya perilaku pindah partai oleh para politisi. Salah satu fakta yang konkret dalam mendorong seseorang untuk berpindah dari satu partai ke partai yang lainnya adalah dampak dari oportunisme yang melekat.²⁰ Namun, setiap para politisi atau kader yang melakukan pindah partai, pasti memiliki alasan-alasan tertentu dalam menjadi kader partai politik yang dituju.

Alasan-alasan tertentu yang dimaksud adalah akibat dari penerapan kebijakan pemilu sebelumnya dalam meraih jumlah suara minimum yang harus diperoleh suatu partai atau kandidat untuk mendapatkan kursi di badan legislatif, biasanya disebut dengan *electoral threshold* (ambang pemilihan).²¹ Hal ini mengharuskan seseorang yang bersangkutan berpindah politik dalam rangka melanjutkan karier politiknya. Konflik internal yang mengakibatkan seorang kader tidak nyaman juga menjadi fenomena politik yang menunjukkan seorang kader akan berpindah ke partai lain. Selain itu, adanya perubahan orientasi politik visi dan misi di dalam partai juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya seorang kader untuk berpindah ke partai

²⁰ Shabrina Hana Mutiara Negara, "Perilaku 'Lompat Pagar' Politisi Menjelang Pemilu Legislatif 2014 Di Jawa Tengah," *e-journal undip*, 2017, 1-13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/27335/23867>.

²¹ *Ibid*, hal. 3

lainnya.²² Dalam hal ini, loyalitas dan ideologi politik yang dianut oleh seorang kader atau politisi menjadi suatu yang dapat dipertanyakan.

Menurut Yasraf Amir Piliang, bahwa perubahan sistem perpolitikan di Indonesia pada era reformasi serta budaya politisi yang tidak mengedepankan etika dan rasa malu juga menjadi penyebab para elit politik tersebut berpetualang.²³ Setelah jatuhnya rezim otoriter yang dipimpin oleh Jenderal Bintang Lima Suharto pada masa yang disebut sebagai fase orde baru, masyarakat Indonesia menghadapi serangkaian tindakan yang mengkhawatirkan dan isu-isu mendesak yang menarik perhatian publik, salah satunya sikap yang diperlihatkan secara terang-terangan oleh para elit politik yang dengan mudah mengambil sikap berpindah partai, seperti layaknya pemeran utama di sinetron tertentu, namun juga dapat menjadi pemeran antagonis di sinetron lain begitupun pada sinetron lainnya.²⁴

Pada tahun 2023, Provinsi Sumatera Barat juga diwarnai oleh fenomena perilaku pindah partai yang dilakukan oleh sejumlah caleg. Fenomena ini dapat dilihat seperti yang dilakukan oleh sejumlah caleg yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

²² *Ibid*, hal. 3

²³ Sukardi Weda, *Politik dan Rekayasa Bahasa*, ed. Rusdin Tompo (Sulawesi Selatan: MediaQita Foundation, 2015).

²⁴ *Ibid*.

Tabel 1. 2
Daftar Pindah Partai oleh Calon Legislatif di Provinsi Sumatera Sumatera
Barat Tahun 2023

No	Nama Calon Legislatif	Partai Lama	Partai Baru	Status Calon Legislatif	
		Pemilu Legislatif 2019	Pemilu Legislatif 2024	2019	2024
1	Maidestal Hari Mahesa	PPP	PDIP	Caleg DPRD Kota Padang	Caleg DPRD Kota Padang
2	Nofrizon	Demokrat	PPP	Caleg DPRD Provinsi Sumbar	Caleg DPRD Provinsi Sumbar
3	Helmi Moesim	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Golongan Karya (Golkar)	Caleg DPRD Kota Padang	Caleg DPRD Kota Padang
4	Iswandi Muchtar	PKB	Demokrat	Caleg DPRD Kota Padang	Caleg DPRD Kota Padang

Sumber: radarsambar.com yang sudah diolah oleh peneliti tahun 2023

Dapat dilihat pada tabel tersebut, tampak jelas perpindahan (*nomadisme*) politik yang terjadi pada caleg di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Data yang menampilkan perpindahan (*nomadisme*) politik di Provinsi Sumatera Barat sangat minim ditemukan pada media massa, sehingga hanya data di tahun 2023 yang menampilkan deretan politisi yang melakukan pindah partai hingga pindah jalur pencalegan dari yang awalnya caleg DPRD Kab/Kota yang harus maju menggandeng sebuah partai kemudian maju secara independen karena menjadi caleg DPD RI.

Data yang dimuat dalam tabel tersebut dipublikasikan dalam media sosial melalui situs berita online pada awal tahun 2023 yaitu tanggal 9 April yang kemudian diolah kembali pada penelitian ini untuk dikategorikan ke dalam politisi yang berstatus caleg pada pemilu 2024 sehingga hanya terdapat 3 orang caleg yang berstatus politik

sebagai caleg DPRD Kota Padang dan 1 orang caleg lainnya memiliki status politik sebagai caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat yang maju bersama partai barunya. Pemilihan politisi berdasarkan kategori caleg dikarenakan adanya sebuah keberanian yang kuat dari seorang politisi yang sedang berkompetisi dalam keberlangsungan politiknya, namun berani mengambil langkah yang penuh resiko yaitu perpindahan (*nomadisme*) politik karena dapat menjadi sebuah ancaman dalam perolehan suara yang didapatkannya. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang dari keberanian yang dimiliki oleh seorang politisi dalam mengambil langkah tersebut juga menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, data caleg yang diambil dalam melakukan perpindahan (*nomadisme*) politik umumnya merupakan caleg DPRD Kota Padang mengingat temuan data yang diolah diambil pada awal tahun 2023.

Sebelum melakukan perpindahan (*nomadisme*) politik, caleg bersama partai lamanya maju kembali sebagai caleg pada pemilu 2019. Pada pemilu 2019 tersebut, caleg yang saat ini maju dengan partai baru berhasil maju sebagai legislator pada periode 2019-2024 sebanyak 3 orang yakni Maidestal Hari Mahesa, Nofrizon, dan Helmi Moesim. Sedangkan, Iswandi Muchtar belum berhasil kembali duduk sebagai legislator pada saat itu. Oleh karena itu, terdapat perolehan suara dari masing-masing caleg pada pemilu 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 3**Perolehan Suara Calon Legislatif di Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019**

No	Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara	Status Politik
1	Maideстал Hari Mahesa	4.532	Kalah
2	Nofrizon	12.232	Menang
3	Helmi Moesim	2.934	Menang
4	Iswandi Muchtar	1.535	Kalah

Sumber: *kpu.go.id* yang sudah diolah oleh peneliti tahun 2023

Berdasarkan data daftar caleg diatas, terdapat fakta-fakta yang terkait pada caleg tersebut. *Pertama*, Maideстал Hari Mahesa merupakan sosok yang suka mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) maupun kebijakan yang berasal dari tempat kerjanya di Kantor DPRD Kota Padang. Akibatnya, banyak pihak-pihak yang tidak merasa senang dengan tindakan dari Maideстал Hari Mahesa yang selalu menjadi kritikus dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, sering terjadinya upaya pemberhentian Maideстал Hari Mahesa dari keanggotaannya sebagai anggota PAC PPP Padang Barat oleh DPC Kota Padang. Hal ini akan berujung pada pemberhentian Maideстал Hari Mahesa dari anggota DPRD Kota Padang dan akan menjalani Pergantian Antarwaktu (PAW). Akan tetapi, upaya tersebut gagal karena DPW PPP Sumatera Barat dan DPP Pusat tidak setuju atas pemberhentian yang dijatuhkan kepada Maideстал Hari Mahesa dengan alasan tidak sesuai dengan AD/ART Partai.²⁵ Setelah hampir 24 tahun bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan berjuang sebagai penyambung aspirasi rakyat selama tiga periode atau 15 tahun, Maideстал Hari Mahesa kini sudah melanjutkan karier politiknya di Partai Demokrasi

²⁵ Mevri Haritama, “Studi Biografi Maideстал Hari Mahesa dalam Kancah Politik dan Organisasi tahun 2004-2016”, Skripsi, (STKIP PGRI Sumatera Barat, 2017).

Indonesia (PDI Perjuangan menjadi caleg untuk daerah pemilihan (dapil) 6 Kota Padang (Kecamatan Padang Barat, Padang Utara dan Nanggalo).²⁶

Kedua, Nofrizon dahulunya seorang kader dari Partai Demokrat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat (DPRD Sumbar). Nofrizon bertentangan dengan Ketua DPD Partai Demokrat yaitu Mulyadi dan akhirnya Nofrizon diberhentikan oleh Mulyadi. Pemicu dari terjadinya polemik ini adalah karena Nofrizon melakukan pindah partai ke partai lain yaitu PPP. Sehingga, saat ini DPD Partai Demokrat melakukan proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Nofrizon dengan Irwan Fikri yang dahulunya mantan wakil Bupati Agam sebagai penggantinya.²⁷ Nofrizon yang dahulu seorang anggota DPRD Sumbar tiga periode dari Partai Demokrat, kini di Pemilu 2024 menjadi caleg PPP dapil sumbar III dengan cakupan wilayah Bukittinggi dan Kabupaten Agam.²⁸ Saat ini, sisa masa jabatan 2019-2024 Nofrizon sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dilanjutkan oleh Hj. Ermaneli sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.²⁹

²⁶ Redaksi, “Langkah Politik Maifestal Hari Mahesa: 24 Tahun di PPP, Kini Berlabuh ke PDI Perjuangan,” *langgam.id*, last modified 2023, diakses 23 Desember, 2023, <https://langgam.id/langkah-politik-maifestal-hari-mahesa-24-tahun-di-ppp-kini-berlabuh-ke-pdi-perjuangan/>.

²⁷ Nofri Affandi, “Loncat Partai Jelang Pileg 2024, Seorang Anggota DPRD Sumbar ‘Dipecat’ dari Partai Demokrat,” *tvonenews.com*, last modified 2023, diakses 23 Oktober, 2023, <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/124306-loncat-partai-jelang-pileg-2024-seorang-anggota-dprd-sumbar-dipecat-dari-partai-demokrat?page=all>.

²⁸ Admin, “Jadi Caleg PPP, Nofrizon Siapkan Penangkal dari Serangan Petir Siang Bolong,” *Fixsumbar*, last modified 2023, diakses 23 Desember, 2023, <https://www.fixsumbar.com/jadi-caleg-ppp-nofrizon-siapkan-penangkal-dari-serangan-petir-siang-bolong/>.

²⁹ Admin, “Ermaneli Resmi Menjadi PAW Anggota DPRD Sumbar Menggantikan Nofrizon,” *dprd.sumbarprov.go.id*, last modified 2023, diakses 23 Oktober, 2023, <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/2301>.

Ketiga, Helmi Moesim merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang periode 2019-2024 dari kader Partai Beringin Karya (Berkarya). Helmi Moesim akan kembali maju pada Pemilu 2024, namun dari Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) V yang mencakup daerah Kecamatan Padang Timur dan Padang Selatan.³⁰ Helmi Moesim memilih untuk pindah partai ke Partai Golongan Karya (Golkar) karena Partai Beringin Karya (Berkarya) tidak lolos pada Pemilu 2024. Jika Helmi Moesim tidak melakukan pindah partai, maka ia tidak bisa memperpanjang Surat Keputusan (SK) menjadi wakil rakyat di Kota Padang dan kembali menjadi masyarakat biasa.³¹

Terakhir, Iswandi Muchtar kembali maju menjadi anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Demokrat. Iswandi tidak lagi menjadi kader dari PKB.³² Saat ini, Iswandi Muchtar maju menjadi caleg DPRD Padang melalui Partai Demokrat Kota Padang untuk dapil 2 yang mencakup wilayah Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah.³³

³⁰ Muhammad Aidil, "Anggota DPRD Padang Kembali Maju dari Partai Berbeda di Pemilu 2024, Ini Kata Sekwan dan KPU," *Radarsumbar.com*, last modified 2023, diakses 23 Oktober, 2023, <https://radarsumbar.com/anggota-dprd-padang-kembali-maju-dari-partai-berbeda-di-pemilu-2024-ini-kata-sekwan-dan-kpu/>.

³¹ Reviandi, "Harap Cemas Anggota DPRD dari Berkarya," *Posmetropadang.co.id*, last modified 2023, diakses 23 Oktober, 2023, <https://posmetropadang.co.id/harap-cemas-anggota-dprd-dari-berkarya/>.

³² Redaksi, "Politisi di Sumbar Ramai-ramai Pindah Partai jelang Pemilu 2024, Siapa Saja?," *Radarsumbar.com*, last modified 2023, diakses 23 Oktober, 2023, <https://radarsumbar.com/politisi-di-sumbar-ramai-ramai-pindah-partai-jelang-pemilu-2024-siapa-saja/>.

³³ Agusmardi, "Iswandi Muchtar is Back, Maju Caleg DPRD Padang Dapil Kuranji dari Partai Demokrat," *Forumsumbar.com*, last modified 2023, diakses 25 Desember, 2023, <https://forumsumbar.com/berita/32055/iswandi-muchtar-is-back-maju-caleg-dprd-padang-dapil-kuranji-dari-partai-demokrat/>.

Berdasarkan fakta-fakta yang peneliti temukan pada paparan di atas, peneliti membangun asumsi bahwa terjadinya perpindahan (*nomadisme*) politik pada caleg di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 disebabkan oleh politisi yang memiliki ideologi yang tidak jelas. Sebab, ideologi yang ia miliki belum tentu sama dengan ideologi parpol yang menjadi partai barunya. Apalagi, dalam fenomena yang terjadi dalam penelitian ini dilakukan oleh caleg yang maju bersama partai barunya. Sehingga dalam hal ini, kesan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri tergambar pada saat terjadinya keputusan para caleg untuk berpindah parpol atau dengan kata lain menjadi langkah cepat seorang kader atau politisi dalam memuluskan karier politiknya dalam meraih kekuasaan yang dapat disebut dengan pragmatis. Dengan demikian, jika kepentingan seorang pragmatis tidak terjawab dalam partainya, maka ia akan segera memilih partai lainnya.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor atau motif dari perilaku berpindah partai yang dilakukan oleh para caleg pada fenomena perpindahan (*nomadisme*) politik, khususnya di Sumatera Barat. Jika ditinjau lebih jauh, faktor-faktor problematika yang mendorong calon anggota parlemen berpindah partai memperlihatkan bahwa perpindahan partai merupakan penyebab kemunduran bagi partai politik, baik dari segi visi misi maupun sistem partai yang mencakup pada ideologi dan institusi internal mereka. Lebih jauh lagi, dapat berdampak pada kinerja partai politik dan integritas individu dalam berpolitik. Sebab, partai politik gagal melindungi kepentingan individu anggota partai sehingga dianggap gagal dalam

menjaga hubungan politik antar anggota partai.³⁴ Hal ini tersebut dapat terjadi karena tidak adanya integritas atau landasan yang kokoh dalam proses pendidikan politik, baik dalam pembinaan kader di lingkungan partai politik maupun dalam sikap bermasyarakat pada umumnya, sehingga menyebabkan tergerusnya idealisme politik yang terjadi dalam partai politik beserta aktor politik yang kemudian dapat menyebabkan ketidakstabilan politik.

Dengan demikian, peneliti akan menggunakan fakta-fakta diatas sebagai data awal dalam melihat lebih jauh perpindahan (*nomadisme*) politik pada caleg. Dalam menjaga penelitian ini agar lebih terarah dan tepat sasaran serta menjaga pembahasan tidak terlalu luas ruang lingkupnya, maka berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa terjadinya perpindahan (*nomadisme*) politik pada caleg di provinsi sumatera barat pada tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan mendeskripsikan dan menjelaskan faktor-faktor atau motif perpindahan (*nomadisme*) politik pada caleg di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

³⁴ Chudry Sitompul, "Konflik Internal Partai Sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem Multi Partai Di Indonesia," Jurnal Legislasi Indonesia 5, no. 1 (2008), https://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=437:konflik-internal-partai-sebagai-salah-satu-penyebab-kompleksitas-sistem-multi-partai-di-indonesia&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180&lang=en.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi lainnya. Selain itu, mahasiswa dapat memahami faktor-faktor atau motif yang terjadi pada politisi yang pindah partai. Serta, masyarakat dapat mengetahui politisi yang berideologi dan politisi yang pragmatis akan kekuasaan.

b. Secara Akademis

Secara Akademis, penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi peneliti yang akan meneliti perilaku pindah partai pada caleg di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

